

LAMPIRAN ARTIKEL BERITA

Artikel Berita

1. Panjimas.com

PUSHAMI: Ahok Menabuh Genderang Perang dengan Umat Islam!

8 Oct 2016



JAKARTA (Panjimas.com) – Pernyataan Ahok yang menghina Al-Qur'an dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah menyakiti Umat Islam.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI), Mohammad Hariadi Nasution S.H., M.H., C.L.A.

Video Ahok saat menghadiri acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan Warga Pulau seribu yang dipublikasikan pada tanggal 28 september 2016 oleh akun chanel *Youtube* Pemprov DKI Jakarta tidak hanya merupakan tindak pidana penistaan agama sebagaimana pasal 156 A KUHP Jo Pasal 4 UU No 1 PNPS 1965 , namun sudah melanggar HAM dan UUD 1945, yang dapat berimbas pada terganggunya ketertiban umum dan stabilitas NKRI.

"Dalam UUD 1945 pasal 28 J (2) dan Undang Undang HAM pasal 70 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis," kata Hariadi kepada *Panjimas.com*, Kamis (6/10/2016).

Ia mengungkapkan, sebagai pejabat negara apabila ingin mengeluarkan statement yang berkaitan dengan kepercayaan orang lain, harus mempertimbangkan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

"Dengan menyatakan bahwasanya surat Al-Maidah ayat 51 itu bohong ,telah menyakiti umat Islam dan menista Al-Quran yang suci," tegas pria yang akrab disapa Ombat ini.

"Sikap tersebut menunjukkan bahwa Ahok adalah orang yang intoleran dan fasis, yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Terlebih lagi penghinaan ini dilakukan Ahok yang bukan seorang Muslim. Itu sama saja menabuh genderang perang dengan Umat Islam," sambungnya.

Ahok, tidak hanya menghina Umat Islam Indonesia namun menghina Umat Islam seluruh dunia. Sehingga permohonan maaf pun tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini.

"Untuk itu, kami mendesak pihak kepolisian sebagai penegak hukum segera mengambil tindakan hukum atas tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok agar stabilitas NKRI dan Ketertiban umum dapat terjaga," tandasnya.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, PUSHAMI akan segera melakukan upaya hukum dengan melaporkan Ahok ke Mabes POLRI, Komnas HAM dan Bawaslu. [AW]

Pemuda Sulawesi Tengah Minta Polri Penjarakan Ahok

10 Oct 2018



PALU, (Panjimas.com) – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Muslim Sulawesi Tengah menggelar aksi demonstrasi di Markas Polda Sulteng, di Palu, Minggu, menuntut Polri menindaklanjuti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

Organisasi yang tergabung dalam aliansi, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Unit Pengkajian Islam Mahasiswa Untad. Demikian dilansir antara Senin, (10/10).

Massa yang berjalan kaki dari Taman GOR Palu menuju Mapolda Sulteng, tidak henti-hentinya meneriakkan "Penjarakan Ahok". Mereka juga menilai pernyataan Ahok telah menistakan ajaran agama Islam yang menimbulkan kemarahan umat Islam di Tanah Air.

Koordinator lapangan Aliansi Pemuda Muslim Sulteng Syahrawan mendesak Polri mengusut tuntas laporan berbagai ormas terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok yang telah melukai perasaan umat Islam.

Selain itu, pihaknya mendesak Polri bertindak tegas dan serius menangani perkara ini, mengingat umat Islam sedang terbakar hatinya oleh pernyataan Ahok, agar kestabilan di Tanah Air tetap terjaga.

Ustaz Hartono, Pimpinan Ponpes Hidayatullah Palu, ikut bergabung dalam aksi dan didaulat menyampaikan orasi.

“Kami turun ke jalan karena panggilan akidah, bukan karena bayaran dari pihak berkepentingan dalam Pilkada Jakarta. Ahok telah menistakan agama Islam dengan mengatakan isi Alquran sebuah kebohongan,” kata Hartono disambut takbir peserta aksi.

Hartono menambahkan, jika Ahok tidak diproses secara hukum, maka akan menimbulkan reaksi yang lebih besar dari umat Islam.

“Kami ikhlas umat Islam yang dituduh teroris untuk diproses hukum, tapi kenapa mereka yang melecehkan Islam tidak diproses secara hukum pula. Jangan heran jika umat Islam marah karena hukum tidak adil,” katanya lagi.

Sebelum meninggalkan Mapolda Sulteng, perwakilan massa aksi, yakni Ustaz Hartono, Muh. Fery (Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah), Andi Akbar (Tim Pembela Muslim), Harun Nyak Itam Abu (TPM), Syahrawan (Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan Imam Sudirman (Ketua HMI Cabang Palu) melaporkan Ahok kepada penyidik Polda Sulteng dalam kasus penistaan agama. [RN]

HAMI Siapkan 20 Pengacara Bela Buni Yani dan Gugat Balik

11 Oct 2018



JAKARTA, (Panjimas.com) – Selain melaporkan Ahok, DPD HAMI DKI Jakarta juga sudah menyiapkan 20 Pengacaranya untuk membela akademisi Buni Yani yang dilaporkan Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan memprovokasi masyarakat dengan memposting potongan dari video asli pernyataan Ahok terkait Al-Maidah ayat 51. Kedatangan ke Polda juga sekaligus melaporkan balik Kelompok Relawan Kotak Adja atas pencemaran nama baik Buni Yani.

“Saya dan kawan-kawan HAMI Jakarta sudah menerima kuasa untuk mendampingi dan membela hak hukum Pak Buni Yani. Kami akan lawan oknum-oknum yang coba-coba membungkan kebenaran dan kebebasan berpendapat,” tegas Aldwin. Ahad, (10/10).

Menurut Aldwin, pelaporan Buni Yani adalah strategi kuno untuk menakuti-nakuti masyarakat agar tidak lagi mempersoalkan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

“Kalau Buni Yani diperiksa, maka Ahok juga wajib diperiksa. Karena obyek utama persoalan ini adalah perkataan Ahok yang diduga kuat menistakan agama. Kami berharap kasus ini sampai ke pengadilan. Karena yang menentukan Ahok menista agama atau tidak bukan dia apalagi pendukungnya, tetapi pengadilan,” pungkas Aldwin. [RN]

Kapolri Larang Aksi 2 Desember, PUSHAMI: Pemerintah tak Adil dan Langgar Konstitusi!

22 Nov 2018



JAKARTA,(Panjimas.com) – Ketua Badan Pengurus Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PusHAMI), Ombat Nasution menyatakan perbuatan menghalangi unjuk rasa (demo) merupakan pelanggaran konstitusi. Bahkan dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 pasal 18 mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Ombat menilai pernyataan Kapolri, Jendral Tito Karnavian yang tidak mengizinkan bahkan akan membubarkan aksi yang akan digelar 2 Desember mendatang adalah sebuah pelanggaran konstitusi.

“Kalau misal ini dilarang, ini justru melanggar konstitusi. Itu hak warga negara, kontrol dan filter negara itu ada di masyarakat” tegas Ombat saat ditelepon *Panjimas*, Senin (21/11/2016).

Menurut Ombat, Aksi 2 Desember sebagai bentuk kekecewaan masyarakat akan ketidakadilan yang terjadi atas kasus penistaan agama oleh Ahok. Masyarakat hanya ingin menuntut pada pemerintah dan aparat, untuk ditegakkan hukum yang adil.

“Pemerintah yang tidak adil dan tidak menempatkan posisinya, masyarakat memandang ini ada sesuatu. Harusnya pemerintah juga merespon masyarakat” ujarnya.

Ombat menegaskan aksi umat Islam 2 Desember sebagai bentuk permohonan umat Islam kepada Allah untuk meminta pemimpin yang adil. Namun tanggapan Kapolri saat ini justru membuka mata masyarakat seperti apa sifat pemimpin kita saat ini.

“Jadi kita mohon kepada Allah minta pemimpin kita adil. Tapi ini ditanggapi seperti itu, kalau mereka bersikap seperti itu berarti mereka tidak peka” tandasnya. [SY]

GNPF MUI: Al Maidah 51 Sudah Jadi Masalah Internasional

14 Nov 2016



JAKARTA, (Panjimas.com) – Aksi damai bela Islam yang diikuti jutaan umat Islam Indonesia telah menuai simpati dan perhatian banyak pihak. Perhatian tersebut tidak hanya diberikan oleh sejumlah tokoh di tanah air, tapi juga meluas hingga mancanegara.

"Al Maidah 51 sudah jadi masalah internasional, tidak lagi nasional. Di Turki tokoh-tokohnya juga memantau, media-media internasional juga ada yang pro kita," ujar Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Ustadz Bachtiar Nasir pada Malam Peringatan dan Doa untuk syuhada #Aksi411 di Masjid Al Furqan, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Jl. Kramat Raya 45, Jakarta, Jum'at malam (11/11).

UBN, sapaan akrabnya, menginformasikan dukungan itu turut mengalir dari para dai dan ulama di Makkah al Mukaromah. Ia mengaku dikirim audio dari para dai di Makkah yang turut mendoakan perjuangan umat Islam untuk membela kehormatan al Qur'an.

"Kami saudaramu di Makkah kami para dai di Makkah terus memantau perkembangan dan kami bersama kalian," ujar Ustadz Bachtiar menirukan bunyi pesan para dai dan ulama di tanah haram tersebut.

Bachtiar menegaskan, GNPF MUI tidak ingin kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diseret-seret ke masalah politik. GNPF MUI tetap bergerak dalam koridor penegakan hukum agar Ahok diadili atas tindakan penodaan agama.

"Kami tidak ingin dipolitisasi. Ini perkara gerakan supremasi hukum," tegasnya.

Selarang ini, lanjut UBN, banyak yang gagal paham terhadap yang terjadi. Ia menghimbau agar jangan hanya melihat masalah ini dari yang tersirat, tapi lihat yang tersurat.

"Ini bukan permasalahan GNPF, tapi ini persoalan umat Islam," paparnya. [RN/Pizaro]

2. Eramuslim.com

Pelanggaran Hukum Ahok Adalah Menyebut Al Quran Alat Pembodohan

Redaksi – Selasa, 1 Safer 1438 H / 1 November 2016 14:43 WIB



Eramuslim.com – Gubernur DKI Jakarta (non aktif), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, layak dipidana penjara dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya saat berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu pada akhir September lalu.

BERITA TERKAIT

[Panas! Polisi Sambangi Rumah WaKa Muhammadiyah Jateng, Cegah Ikut Aksi 4 Nov](#)

[Mbak Rachma Kaget Habib Rizieq Pernah Kuliah di Universitas Bung Karno](#)

[Plt Gubernur DKI Temukan 12 Proyek Bermasalah Kerjaan Ahok](#)

[Anton Medan Sesumbang Akan Kerahkan Massanya Pukul Mundur Aksi Demo 4 Nov](#)

[ILUNI-UI Pastikan Ikut Turun ke Jalan Pada Aksi 4 November](#)

Demikian disampaikan juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, dalam acara diskusi bertajuk "Membedah Kasus Ahok: Apakah Penistaan Agama?" di Hotel Ambara, Jakarta Selatan, Selasa (1/11).

"Ucapan seorang Ahok yang mengatakan 'dibohongi pakai Surat Al Maidah', kalau diperhatikan apa yang diucapkan Ahok itu sudah bisa disebut penistaan agama bisa dipidana penjara," ujarnya.

Dijabarkan Munarman bahwa kata "dibohongi pakai surat Al Maidah" memiliki makna bahwa Al Quran merupakan instrumen pembodohan.

Menurutnya, apa yang diucapkan Ahok itu mengandung makna penodaan agama dan memicu permusuhan antar umat agama di Indonesia.

"Dibohongi Al Maidah, kata-kata dibohongi atau pakai Al Maidah substansinya sama, dalam konteks ini penodaan. Al Quran disebut sebagai satu alat yang bisa digunakan untuk membohongi. Ini pelanggaran hukumnya Ahok," sambungnya.

"Siapa pun berhak melaporkan. bahkan tanpa laporan pun aparat hukum wajib melakukan penyidikan dan penyelidikan," tegas Munarman.(ts/rmol)

Jokowi dan Kapolri Diingatkan, Ahok Sudah Pantas Dipenjarakan



Redaksi – Kamis, 3 Sefar 1438 H / 3 November 2016 08:30 WIB



Eramuslim.com – Aparat Kepolisian harus segera memberikan kejelasan terkait penanganan proses hukum dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki

Tjahaja Purnama.

Begitu dikatakan Kepala Bidang Politik dan Hukum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persis, Lutfi Anwar Muchtadi, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (2/11).

"Jangan sampai ketidakjelasan jawaban dan ketidaktegasan Bapak Jenderal Tito Karnavian dalam kasus ini memuncakkan kemarahan kaum muslimin yang kecewa dengan sikap dan kinerja Bapak yang seolah-olah ada intervensi dari pihak lain," sambungnya.

Perbuatan Ahok, lanjut Lutfi, sudah jelas masuk dalam kasus pidana yang tertera di UU KUHP 156 a sebagai bentuk penodaan terhadap agama, sama seperti Arwendu yang dihukum 5 tahun penjara dan Rugsiani dipenjarakan 14 bulan karena melecehkan agama.

"Tidak ada alasan lagi untuk menangguhkan kasus Ahok ini, semua umat muslim sudah tahu bahwa Ahok sudah pantas untuk dipenjarakan," kata dia.

Presiden Joko Widodo dan Jenderal Tito, lanjut Lutfi, seharusnya bisa lebih bijak dalam menyikapi keresahan masyarakat dalam kasus penodaan Ahok.

"Bapak Presiden Joko Widodo (juga) jangan hanya diam saja melihat hukum yang tidak ditegakkan. Jangan sampai Negara Indonesia menjadi negara hukum yang tunduk pada kekuatan politik dan kekuatan penguasa," demikian Lutfi. (ts/rmol)

BERITA TERKAIT

7.500 Muslim Palembang Bergerak ke Jakarta Dikawal Polisi

Pelawak Komeng: Ahok Dipidana, Jakarta Bakal Adem Lagi

Beni Pramula: Pemuda & Mahasiswa, Saatnya Singsingkan Lengan Baju, Usir Nekolim!

PB-HMI Instruksikan Seluruh Kadernya Turun ke Jalan pada 4 November

Beredar Kabar, Dua Tokoh Kunci di Belakang Ahok Memintanya Mundur dari Pilkada

Din Syamsuddin: Aneh, Ahok Yang Salah kok Buni Yani yang Mau Jadi Tersangka?



Redaksi – Kamis, 10 Safar 1438 H / 10 November 2016 11:00 WIB



Eramuslim.com – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin angkat bicara terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Din Syamsuddin

mempertanyakan kepada aparat penegak hukum karena kasus yang melukai perasaan umat Muslim itu kini justru beralih ke Buni Yani, seorang dosen yang dituding menjadi pengunggah video Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu pada akhir September.

Din Syamsuddin berpendapat aparat terkesan mengalihkan perhatian karena yang diperdebatkan adalah penggunaan kata 'pakai' atau tidak ada kata 'pakai', padahal menurutnya hal itu memiliki makna yang sama. Si Pengunggah (Buni Yani) kata Din Syamsuddin justru menjadi fokus penanganan hukumnya.

"Luar biasa hukum negeri kita ini, yang salah itu Ahok, kok malah Buni Yani yang mau jadi tersangka," terang Din Syamsuddin, Rabu (9/11/2016).

Pria yang saat ini menjabat sebagai ketua pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu menjelaskan, kasus Ahok itu jelas-jelas melukai perasaan umat Muslim di Indonesia. Jadi ini bukan hanya urusan seorang Buni Yani oleh karena itu ada banyak umat yang melakukan unjuk rasa.

"Ya kalau ada umat Islam tidak merasa ya mungkin perasaannya hilang, jelas yang dirasakan, maka kemarin mereka unjuk rasa," ungkap Din.

Sebelumnya, Ahok dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama. Ahok diduga telah melakukan penistaan agama dengan mengutip Surah Al Maidah Ayat 51 ketika berkunjung ke Kepulauan Seribu pada akhir September lalu.(hj/okzn)

BERITA TERKAIT

[SBP: Masalah Bukan Ahok Semata, Tapi Soal Cina Yang Jajah Indonesia!](#)

[Ahmad Dhani: Kalau Media Jujur, Habib Rizieq Adalah Man Of The Year 2016](#)

[Prodem: Polri Jangan Pernah Lupa Sejarahnya Sendiri](#)

[Kasus Gafatar dan Lady Gaga, Polisi Selalu Merujuk ke MUI, Kenapa Soal Ahok Enggak?](#)

[Kepergok Temani Djarot Kampanye, Walikota Jakbar Harus Dipecat!](#)

Paska Aksi 212 Rumah Pemenangan Ahok Sepi Peminat

f t w e + 14

Redaksi – Selasa, 7 Rabul Awwal 1438 H / 6 Desember 2016 06:00 WIB

Eramuslim.com – Rumah Lembang mulai kehilangan pesonanya. Kini, jumlah warga yang datang ke Rumah Pemenangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat itu perlahan berkurang.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com pada hari ini, Senin (5/12), warga yang datang ke Rumah Lembang tak lebih dari seratus orang.

Padahal sebelumnya, saat posko yang berlokasi di Jalan Lembang Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat itu pertama kali dibuka, masyarakat berbondong-bondong datang.

Ratusan bahkan ribuan massa selalu mewarnai aktivitas keseharian di Rumah Lembang. Namun sekarang, jumlah warga yang datang tak seperti sedia kala.

Belum diketahui apa yang menyebabkan Posko pemenangan Ahok-Djarot itu mulai sepi. Diduga, kasus dugaan penistaan agama Islam dan aksi-aksi besar belakangan agak berpengaruh pada kesukaan warga pada pasangan nomor urut dua itu.

Menurut anggota Tim Pemenangan Ahok-Djarot Bidang

BERITA TERKAIT

Di Inggris, Gunakan Ponsel Saat Berkendara Diancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

John Kerry: Tidak Akan Ada Perdamaian Di Timur Tengah Tanpa Akhiri Konflik Palestina-Zionis Israel

Walla: Diam-Diam Zionis Israel Adakan Perjanjian Kerjasama Rahasia Mengenai Suriah Dengan Rusia

Der Spiegel: Cegah Arus Pencari Suaka, Jerman Berencana Dirikan Kamp Pengungsi Di Tunisia

Rezim Syiah Assad Ultimatum Mujahidin Aleppo: Pergi Atau Kalian Syahid



Kampanye dan Sosialisasi, Guntur Romli, aksi 212 kemarin sedikit berpengaruh pada elektabilitas petahana ke depannya.

"Mereka mau dengan massa sebagai tekanan terhadap proses hukum. Ini bentuk lain dari intervensi, dan

mau gagalkan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI dengan isu Al-Maidah," kilahnya. (ts/jppn)

Media Australia Soroti Kasus Penistaan Agama: Ahok Tidak Punya Filter Dalam Berbicara



Redaksi – Rabu, 18 Muharram 1438 H / 19 Oktober 2016 11:00 WIB



Eramuslim.com – Berita kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama bermunculan di media-media Australia. Setidaknya, berita-berita terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok) sudah mulai bermunculan sejak Selasa (18/10) pagi.

Dugaan penghinaan terhadap Islam oleh Ahok, banyak dijadikan judul sejumlah media Australia, seperti Brisbane Times dan Sydney Morning Herald. Bahkan, mereka menulis kalau Ahok, merupakan orang yang tidak pernah memiliki filter saat berbicara.

Banyak media yang langsung memaparkan sejarah omongan yang kerap menuai kontroversi, selama menjabat sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta. Omongan yang dikutip di antaranya terkait larangan penjualan bir, pengusuran dan pertikaian dengan partai politik.

Mereka sendiri sebenarnya cukup memuji elektabilitas dan popularitas yang dimiliki Ahok, namun kerap menuai kontroversi melalui omongannya. Terakhir, omongannya yang menuding ayat Al-qur'an digunakan untuk berbohong, seakan menjadi puncak kemarahan umat Islam.

Sebelumnya, media-media di Turki ikut memberitakan kasus dugaan penistaan agama Gubernur Jakarta, termasuk soal Basuki Tjahaja Purnama untuk segera diperiksa. Sebagian besar media, baik Turki maupun Australia, tertarik melihat ribuan massa yang melakukan aksi unjuk rasa. (ts/rol)

BERITA TERKAIT

[Irena Handono: Petisi Bubarkan MUI, Makar Terhadap Alim Ulama](#)

[Waspada! Operasi Intelijen Kondisikan Pilkada Jakarta Rusuh](#)

[Ehem! Ahok Bela Sumbangan Komputer PT Sampoerna ke KPU DKI](#)

[Jumat Lusa, Muslim Surabaya dan Malang Bergerak Tuntut Penista Qur'an Dipenjara](#)

[Gubernur Lukas Enembe Bantah Beri Pernyataan Singgung Pilkada DKI 2017](#)

Kapan Ahok Diberhentikan?



Redaksi – Rabu, 15 Rabulul Awwal 1438 H / 14 Desember 2016 14:30 WIB



Eramuslim.com – Status Ahok sudah resmi menjadi terdakwa setelah sidang kasus penistaan agama dimulai, kemarin. Pertanyaanya, kapan Kemendagri akan

memberhentikan Ahok dari jabatan gubernur Jakarta?

Menjawab pertanyaan ini, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono memastikan pihaknya belum memberhentikan pria bernama lengkap Basuki Tjahja Purnama itu. "Belum (diberhentikan sementara)," ujar Sumarsono kepada Rakyat Merdeka,semalam.

Alasannya, kata Sumarsono, karena pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Ahok sebagai terdakwa. Menurutnya, secara administrasi surat itu diperlukan sebagai landasan hukum penegakan UU. "Belum sampai (suratnya)," tambahnya.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), tepatnya pasal 83, setiap kepala daerah yang menjadi terdakwa dan menjalani persidangan akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pada ayat 1 pasal ini disebutkan, "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Melanjutkan keterangan, kata Sumarsono, jika surat keterangan terdakwa sudah diterima Kemendagri, surat ini akan diteruskan ke Presiden Jokowi untuk dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Setelah Perpres turun, katanya, barulah Kemendagri menerbitkan surat pemberhentian sementara Ahok sebagai Gubernur Jakarta. "Siapapun juga, ketika surat pengadilan (penetapan terdakwa) itu sampai, kita akan proses semuanya," pungkasnya. (yk/rmol)

BERITA TERKAIT

[Siangnya 'Nangis', Malamnya Dinner di Hotel Mewah](#)

[Aleppo Merintih, Jokowi Malah Bersinggah ke Iran](#)

[Politikus Golkar: Tangisan Ahok, Antara Mental Inlander dan Kejiwaan Menyimpang](#)

[Foto Ahok Dirangkul: Camera, Action...!](#)

[Reuters: Aleppo Telah Jatuh Seluruhnya ke Pasukan Gabungan Syiah-Komunis Rusia](#)